

# Ahkam

*Jurnal Ilmu Syariah*



**Makar dan *Riddah* menurut Hukum Islam:  
Suatu Upaya Reinterpretasi**

**Eksistensi *Hilah* dalam Hukum Islam**

**Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam  
dan Hukum Positif di Indonesia**

***Al-Qadhâ'* dalam Perspektif *Siyâsah***

**Gratifikasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam**

**Penerapan Hukum Potong Tangan dalam Perspektif  
Hak Asasi Manusia**

**Asas-asas Perikatan Islam dalam Hukum Perkawinan**

**Kontekstualisasi Keadilan dalam Hukum *Qishâsh***

**Aplikasi *Mashlahah* dalam Kriminalisasi Pencucian Uang**



## DAFTAR ISI

Makar dan <i>Riddah</i> menurut Hukum Islam: Suatu Upaya Reinterpretasi <b>Masykuri Abdillah</b> .....	139 - 148
Eksistensi <i>Hilah</i> dalam Hukum Islam <b>Ah. Azharuddin Lathif</b> .....	149 - 159
Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia <b>Supriyadi Ahmad</b> .....	160 - 177
<i>Al-Qadhâ'</i> dalam Perspektif <i>Siyâsah</i> <b>Misbahuddin</b> .....	178 - 189
Gratifikasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam <b>Muhammad Nurul Irfan</b> .....	190 - 205
Penerapan Hukum Potong Tangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia <b>Muh. Darwis</b> .....	206 - 220

## PENERAPAN HUKUM POTONG TANGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Muh. Darwis

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo  
Jl. Dr. Ratulangi Palopo Sulawesi Selatan 91921  
e-mail: mdarwis2002@yahoo.com

**Abstract: Application of Hand Mutilation Law in Perspective of Human Rights.** Hand mutilation law and the principle of Human Rights (HAM) have the same philosophical goals that benefit humans. Therefore, the differences between them in certain parts of it should be a solution for the two that they not mutually refute each other. Interpretation of the command of hand cutting by limiting the ability in the form of "imprisonment" seems to be the solution that can bring both to a point.

**Kata Kunci:** Potong tangan, HAM, pidana, pencurian.

### Pendahuluan

Hukum Islam merupakan suatu sistem yang sangat komprehensif dan merupakan sub sistem dalam Islam. Ia dihadirkan oleh Allah Swt. untuk menata kehidupan manusia. Kehadiran Islam dengan melalui sub sistemnya—hukum Islam—mempunyai misi yang sangat suci yaitu untuk menegakkan keadilan demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia (Q.s. al-Nisâ' [4]:58). Sebab, salah satu tujuan pokok yang hendak dicapai oleh hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan.<sup>1</sup>

Hukum Islam mempunyai beberapa bagian, antara lain hukum pidana Islam. Sementara itu, hukum pidana Islam juga dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu *hudûd*, *qishâsh-diyât*, dan takzir. Salah satu dimensi penting yang sering menjadi sorotan dalam hudud adalah hukum potong tangan. Sejalan dengan tujuannya—tegaknya keadilan dan terciptanya kemaslahatan—pidana Islam menawarkan prinsip kehidupan yang lebih menjanjikan bagi manusia. Dalam penerapan hukum pidana Islam, terdapat kehidupan yang lebih laik (Q.s. al-Baqarah [2]:179).

---

<sup>1</sup> Muḥammad al-Thâhir ibn 'Asyûr, *al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Mesir: Dâr al-Salâm, 2005), Cet. I, h. 60.



Meskipun hukum pidana Islam menawarkan solusi terbaik bagi manusia dengan basis utamanya, Alquran dan Hadis, namun hukum pidana Islam, khususnya hukum potong tangan, dipersepsikan sebagai hukum yang tidak sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Persepsi ini, tidak hanya dimotori oleh para orientalis—lewat ucapan dan tulisan—tetapi juga telah dan sedang dimotori oleh umat Islam yang antipati terhadap hukum pidana Islam.

Persepsi yang mereka bangun, pada tataran tertentu, paling tidak telah memicu lahirnya gerakan antipati terhadap hukum pidana Islam. Padahal, hukum pidana Islam baik dalam konsep maupun dalam praktik, bukanlah hukum yang kaku dan sunyi dari interpretasi. 'Umar ibn al-Khaththâb telah membuktikannya<sup>2</sup> meskipun nash menyebutnya secara jelas.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, 'Umar tidak dipandang telah “mengkhianati” ketetapan Allah melainkan ia dipandang telah berhasil menangkap ruh syariah-Nya. Hasil ijtihad 'Umar ibn al-Khaththâb tersebut merupakan pemikiran secara falsafi dan telah mengilhami generasi sesudahnya untuk mengkonstruksi pemikiran di seputar hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam, khususnya hukum potong tangan.

Merujuk pada persepsi di atas, maka penulis mencoba menengahkan tiga pembahasan pada tulisan ini, yaitu konsep dasar tentang hukum potong tangan, hukum potong tangan dalam perspektif HAM, dan solusi antara konsep dasar hukum potong tangan dan HAM.

### Konsep Dasar Hukum Potong Tangan

Perbincangan di seputar potong tangan diawali dengan adanya pernyataan tegas Alquran tentang *had* pencuri (Q.s. al-Mâ'idah [5]:38). Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan sadar dan memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Sementara Sâlim al-Uwâ mengartikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memilikinya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ketika itu, seorang pencuri bernama 'Allâmah al-Hatib ibn Abî Baltah dihadapkan kepada Umar. Di hadapan Khalifah 'Umar, pencuri itu mengakui perbuatannya. Lalu 'Umar memerintahkan untuk meklaksanakan potong tangan. Tetapi sebelum sanksi dijatuhkan, 'Umar membatalkan putusannya karena pada waktu itu, telah terjadi musim paceklik (*'âm al-Ramada*). Lihat Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'în al-Rabb al-'Âlamîn*, (t.tp.: Dâr al-Fikr, 1977), III, h. 22; Lihat juga M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 54.

<sup>3</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, h. 54.

<sup>4</sup> Syarbini al-Khathîb, *Mughni al-Muhtâj*, (Mesir: Dâr al-Bâb al-Halabi wa Awlâduhu, 1958), h. 158.

<sup>5</sup> Sâlim al-Uwâ, *Fî Ushûl al-Nazham al-Jinâ'i al-Islâmi Dirâsah al-Muqâran*, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1978), h. 160.



Dalam hubungannya dengan pencurian, Alquran menetapkan suatu ketentuan hukum bagi pencuri, yaitu dikenakan hukum potong tangan.

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (Q.s. al-Mâ'idah [5]:38).

Merujuk pada ayat di atas dapat dipahami bahwa hukum potong tangan wajib secara syar'i, namun di satu sisi ayat ini masih bersifat umum. Karena itu, diperlukan petunjuk secara teknis tentang ketentuan hukum potong tangan untuk selanjutnya akan ditinjau dari aspek HAM.

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang sangat ketat. Sebab, penegakan pidana Islam, khususnya hukum potong tangan, tanpa disertai dengan syarat akan cenderung merugikan manusia dan dapat menjatuhkan martabat syariah itu sendiri. Sejalan dengan maksud tersebut, para ulama menetapkan syarat-syarat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh A. Jazuli, yaitu: (1) Subyek. Pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. (2) Materi curian. Mengambil secara diam-diam, tidak diketahui oleh pemiliknya dan tanpa kerelaan, barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, barang curian sepenuhnya berada di tangan pencuri. (3) Obyek. Berupa harta benda dan bergerak, dan mencapai satu nilai minimum (nisab).

Selain syarat yang disebutkan di atas, 'Abd Raḥmân al-Maliki menyebutkan juga syarat yang hampir senada, yaitu: (1) Perbuatannya termasuk ke dalam definisi pencurian; (2) Harta yang dicuri mencapai nisab; (3) Harta yang dicuri berupa harta yang terjaga, dan sah secara syar'i untuk dimiliki; (4) Ia mencuri dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan; (5) Harta yang dicuri bukan harta yang syubhat; (6) Pencurinya telah baliq, berakal dan terikat dengan ketentuan hukum; (7) Ditetapkan berdasarkan pengakuan pencuri, atau dengan saksi yang adil.

Berangkat dari syarat-syarat di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pencuri bukanlah perkara mudah, sebab keseluruhan syarat itu harus terpenuhi. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum potong tangan tidak dapat dijatuhkan atas pelaku, misalnya adanya ketentuan nisab. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis, "*Potonglah tangan pencuri pada ¼ dinar, dan janganlah kalian memotong tangan pencuri (karena mencuri) kurang dari itu.*"

Secara tekstual, Hadis tersebut menyebutkan adanya *nishâb* ¼ untuk menerapkan potong tangan. Berdasarkan ketentuan Hadis ini, maka hukum potong tangan tidak dapat ditegakkan apabila tidak mencapai *nishâb* ¼ dinar.

Untuk itulah Muḥammad Quthub menyebutkan bahwa sebelum dijatuhkan



hukuman kepada pencuri, maka terlebih dahulu meninjau dua hal sekaligus. Pertama, sudut pandang penjahat, dan kedua, masyarakat yang menjadi sasaran kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil berpijak pada prinsip keadilan. Sebab, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh hukum yang dibangun dalam kehidupan masyarakat adalah tegaknya keadilan (Q.s. al-Mâ'idah [5]:8, al-An'âm [6]:152).<sup>6</sup>

Apabila dalam suatu kasus pencurian terdapat bukti yang kuat dan terpenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka ketentuan hukum potong tangan dapat diterapkan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah sampai dimana batas tangan yang harus dipotong?

Persoalan pokoknya adalah pada kata *aydiahumâ*, dan karenanya persoalan ini harus dilihat dari aspek bahasa. Dalam konteks bahasa, jika disebut *yad*, artinya adalah dari telapak tangan sampai ujung jari-jari, dan dari telapak tangan sampai pada akhir telapak tangan (al-Maliki, t.th.:106). Namun sebetulnya yang dimaksud adalah hingga pergelangan tangan, dan tidak disebutkan makna lain kecuali ada indikator (*qarînah*). Hal ini didasarkan pada Q.s. al-Mâ'idah [5]:6:

... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...

*Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku ...*

Allah Swt. menjelaskan untuk "membasuh tangan hingga siku". Sekiranya Allah tidak menyebut kata "hingga siku" tentu membasuh tangan hanya sampai dua pergelangan tangan saja. Dengan kata lain, makna membasuh tangan akan dipahami dengan makna bahasa, maka pencuri akan dipotong sampai pada pergelangan tangannya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Abû Bakr dan 'Umar ibn al-Khaththâb memerintahkan untuk memotong tangan kanan pencuri hingga pergelangan apabila dia mencuri.

Selanjutnya, kata *أيد* pengertiannya mutlak untuk tangan. Belum ada *ta'yîn* (spesifikasi) yang jelas. Jadi dari pengertian ini lahir suatu pemahaman tentang bolehnya memotong tangan kanan atau kiri hingga pergelangan. Tetapi dalam *qirâ'ât* Ibn Mas'ûd menyatakan bahwa "potonglah tangan keduanya". Hal ini juga didukung oleh riwayat di atas di mana Abû Bakr dan 'Umar ibn al-Khaththâb memerintahkan untuk memotong tangan kanan pencuri.

Hal senada juga diungkapkan oleh M. Quraish Shihab bahwa pencuri baik laki-laki maupun perempuan, diperintahkan oleh Allah Swt. untuk memotong tangan keduanya hingga pergelangan. Perintah ini dimaksudkan sebagai balasan

---

<sup>6</sup> Muhammad Quthub, *Islam the Misunderstood Religion*, (terjemah) oleh Funky Kusnaedy Timur dengan judul, "Islam Agama Pembebas", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), Cet. I, h. 284.



dan siksaan dari Allah Swt. agar memberi efek jera kepada pencuri.<sup>7</sup>

Sejalan dengan prinsip di atas, maka yang dimaksud dengan potong tangan adalah potong tangan kanan sampai pergelangan. Sedangkan yang dimaksud tangan, dalam bahasa—tanpa adanya qarinah—adalah tulang yang terletak antara pergelangan dan telapak tangan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata *يد يمين* adalah pergelangan tangan. Artinya, apabila seseorang mencuri baik laki-laki maupun perempuan dan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka ditegakkanlah hukum potong tangan—dari jari-jari tangan hingga pergelangan tangan.

Perintah *had* pencurian merupakan hak Allah dan karenanya menegakkannya merupakan suatu keharusan. Mengapa perintah ini begitu tegas dan bukankah perintah ini juga mengindikasikan kejamnya hukum potong tangan ini? Sebetulnya, keharaman perbuatan mencuri yang diberi sanksi di dunia karena adanya pertimbangan syarak yang diharapkan membawa mashlahat bagi masyarakat luas. Dalam kaitan ini, al-Jurjawi menyatakan bahwa pencurian dilarang oleh Islam guna memelihara keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta.<sup>8</sup> Untuk itu, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan dan potong tangan adalah hukum yang tertinggi karena pencurian telah melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut al-Jurjawi menjelaskan bahwa pencurian itu diharamkan karena beberapa hal.<sup>9</sup> Pertama, manusia mencari harta dengan susah payah dan melelahkan, dalam pelbagai profesi dalam kehidupannya. Dalam bekerja, mereka mengurus tenaga, pikiran dan menghabiskan banyak waktu guna memperoleh harta yang diinginkan. Setelah terkumpul, datang pencuri mengambilnya, ini sungguh menyakitkan hati.

Kedua, harta yang diperoleh dengan kerja keras tersebut mungkin untuk persiapan makan, kebutuhan sehari-hari, atau untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit dan atau untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak-hak tersebut akan hilang.

Ketiga, pencuri merusak ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa aman di rumah dan di daerahnya masing-masing. Apabila terjadi pencurian yang disertai kekerasan dan pembunuhan tentu akan membawa kerugian secara fisik maupun psikis di pihak korban dan keluarganya. Karena pencuri dipandang sebagai anggota masyarakat yang merusak tata kehidupan dan ketentraman masyarakat, maka perlu dihukum supaya tidak mencuri lagi.

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. III, h. 85.

<sup>8</sup> Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 302.

<sup>9</sup> Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 202-204.



Dari pernyataan al-Jurjawi tersebut dapat diketahui bahwa betapa bahayanya bagi masyarakat luas jika tindak pidana pencurian merajalela di pelbagai tempat sementara hukum tidak dapat mencegah kejahatan tersebut.

Tuntutan penerapan hukum potong tangan merupakan persoalan yang amat menarik karena pada satu sisi di dalam penerapan hukum itu terkandung adanya jaminan kemashlahatan bagi masyarakat. Namun di lain sisi, dalam perkembangan modern hukum potong tangan ini dinilai tidak lagi sejalan dengan zaman. Bahkan sudah dipandang sebagai hukum yang kolot, dan tidak sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Bagaimana sebetulnya perspektif HAM tentang hukum potong tangan?

### **Hukum Potong Tangan dalam Perspektif HAM**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dicetuskan PBB pada 1948 telah mengubah cara pandang manusia terhadap pentingnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Deklarasi ini dipandang sebagai titik awal pencerahan bagi manusia setelah mengalami keterpurukan dalam pelbagai aspek kehidupannya.

Namun, perlu segera ditambahkan bahwa konsep HAM yang tertuang dalam DUHAM tersebut adalah produk sebuah masa yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang historis, ideologis, dan intelektual yang berkembang pasca perang dunia kedua. Dalam kaitan itu, konsep HAM tersebut merupakan hasil ramuan budaya pasca pencerahan sekuler barat yang tidak berpijak pada prinsip agama.<sup>10</sup>

Dalam upaya memberi pencitraan yang terbaik kepada manusia, maka dirumuskanlah pasal demi pasal materi DUHAM dan disusul dengan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Setelah penulis menelaah pasal demi pasal dalam DUHAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, maka penulis menemukan dua pasal dalam DUHAM dan satu pasal dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang dipandang relevan dengan permasalahan.

Pertama, DUHAM terdiri atas 30 pasal.<sup>11</sup> Dalam pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Sedangkan pasal 5 mengatur bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

---

<sup>10</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragam*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet. VII, h.178 Bandingkan Yusril Ihza Mahendra, *Reaktualisasi Prinsip-prinsip HAM dalam Islam dan UUD 1945 Sebuah Pengantar* dalam Rusjdi Ali Muhammad, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syaria'at Islam", (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004 ), Cet. I, h. xxi.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Pusat Studi HAM Univ. Surabaya, 2003), Cet. I, h. 3.



Kedua, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, terdiri atas 53 pasal.<sup>12</sup> Pasal 17 menyatakan bahwa tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Selanjutnya, dalam kaitan itu pula, Indonesia telah meratifikasi beberapa kovenan, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut terlibat secara aktif mempromosikan HAM. Untuk maksud tersebut, Indonesia telah mengesahkan undang-undang yaitu: (1) UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat manusia. (2) UU. No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1969.

Kedua UU tersebut pada intinya menghendaki agar manusia dapat diperlakukan dan ditempatkan sebagai manusia yang bermartabat. Karena itu, setiap hukuman yang diberlakukan seyogyanya tetap memelihara dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Berpijak pada petunjuk-petunjuk di atas, dapat diajukan pertanyaan apakah pasal-pasal yang termuat dalam DUHAM, Kovenan Internasional, dan Undang-undang tersebut merupakan antitesa terhadap hukum potong tangan? Pada suatu sisi dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut agaknya merefleksikan sebagai antitesa terhadap segala bentuk hukuman yang dipandang dehumanis. Potong tangan, dalam takaran HAM adalah wujud kekerasan terhadap diri manusia. Mengapa hanya dengan mencuri harus dihilangkan anggota tubuhnya (memotong tangan), bukankah justeru hukum Islam menunjukkan jati dirinya sebagai hukum yang menakutkan, kejam dan dehumanis? Bukankah dengan menghilangkan tangan seseorang berarti telah memotong arah hidup seseorang?

Memang secara sepintas dapat dikatakan bahwa hukum potong tangan adalah hukum yang tidak menghargai eksistensi manusia sebagai sosok yang harus dihormati. Bahkan, akan lebih menyedihkan lagi jika seseorang melakukan tindak pidana pencurian karena hanya terdesak oleh kebutuhan lalu dijatuhi hukum potong tangan. Melalui petunjuk pasal-pasal tersebut diketahui bahwa seluruh bentuk hukuman tidak boleh lagi menggunakan kekerasan, kekejaman, apalagi menghilangkan salah satu organ tubuh manusia yang sangat berharga.

Penerapan hukum potong tangan dalam konteks kekinian, sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman telah menggeser cara berpikir dan cara bertindak masyarakat. Sebagai konsekuensinya adalah hukum

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*, h. 15.



yang diproduksi pada masa silam perlu mendapat perhatian yang serius untuk direinterpretasi.

Dalam kaitan ini, Hafid Abbas menyatakan bahwa HAM telah menjadi standar dunia dan banyak negara yang telah meratifikasi aturan-aturan Internasional untuk selanjutnya menjadi dasar bagi suatu negara untuk menghargai hak-hak dasar manusia. Dalam hubungannya dengan hukum potong tangan yang secara spesifik dipandang oleh Barat sebagai hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku secara universal, langkah yang segera harus dilakukan adalah mereinterpretasi hukum potong tangan agar pandangan negatif terhadapnya dapat dihilangkan. Hal ini juga sangat terkait dengan citra Islam di mata dunia Internasional.<sup>13</sup>

Pendapat di atas mencerminkan suatu pandangan yang dibangun di atas paradigma yang kurang sempurna. Karenanya, tidak cukup hanya melihat hukum potong tangan dari segi pelaksanaannya saja. Tetapi, harus pula memperhatikan apa yang menjadi tujuan ingin dicapai oleh suatu hukum. A. Hamzah menyebutkan bahwa tujuan sanksi hukum dalam Islam mencakup empat hal. (1) Pembalasan (*revenge*). Seseorang yang telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini harus dijerat seperti yang ditimpakan kepada orang lain. (2) Penghapusan dosa (*expiation*). (3) Menjerakan (*deterren*). (4) Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*). Pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kejahatannya.<sup>14</sup>

Tujuan sanksi pidana tersebut, khususnya poin kedua dan keempat, secara filosofis menunjukkan bahwa hukum bermaksud mengembalikan manusia pada posisinya semula (fitrah manusia) setelah melakukan "pengkhianatan" terhadap citranya. Dengan sanksi, dosa pencuri diampuni sehingga bersih dan terbebas dari jeratan hukum di akhirat. Selanjutnya, sanksi juga diharapkan dapat mengubah cara pandang dan perilaku pencuri menuju ke arah yang lebih baik.

Apabila ditelaah lebih jauh lagi, maka akan ditemukan adanya titik persamaan antara tujuan yang hendak dicapai melalui DUHAM dan hukum Islam khususnya hukum potong tangan. Karena semangat dari DUHAM menurut Peter Dailey adalah membebaskan manusia dari segala bentuk kejahatan yang dapat mencederai harkat dan martabatnya.<sup>15</sup> Hal senada diungkapkan oleh Thomas Fleiner bahwa esensi HAM adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>16</sup> Sedangkan

<sup>13</sup> Hafid Abbas, *Wawancara*, Hari Sabtu, 24 Juni 2006 jam 4.30 di Jakarta.

<sup>14</sup> A. Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Akan Datang*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet. II, h. 15.

<sup>15</sup> Peter Dailey, *Bringing Human Right to Life*, (Australia: The Foundation Press, 1993), h. 230.

<sup>16</sup> Thomas Fleiner, *What are Humman Rights?*, (New South Wales, Australia: The Federation



hukum Islam melalui tujuan sanksinya dipahami sebagai suatu metode untuk mengembalikan manusia ke posisi semula, citra-Nya yang terbaik.

Hal ini membuktikan bahwa hukum potong tangan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bukan untuk menyiksa. Karena itu, segala bentuk sanksi pidana harus sesuai dengan kemashlahatan dan maqashid al-Syariah. Mungkin agak lebih bijak apabila HAM dipandang sebagai suatu metode modern untuk menghormati manusia agar berada dalam bingkai kehormatan.

### **Solusi antara Konsep Dasar Hukum Potong Tangan dan HAM**

Alquran (al-Baqarah [20]:168, al-Mâ'idah [5]:88, al-Anfâl [8]:69, al-Nahl [16]:114) telah mengamanahkan kepada manusia agar mencari dan mengkonsumsi makanan dari sumber yang halal. Hal ini berarti bahwa segala bentuk yang tidak halal tidak diperkenankan dalam Islam. Namun, dalam faktanya manusia belum mampu menerapkan secara utuh prinsip ini. Bahkan, mencuri juga dipandang sebagai solusi untuk keluar dari pelbagai desakan hidup.

Untuk mengantisipasi penyakit sosial ini—mencuri—ditetapkan hukum yang dapat mengatasinya yaitu hukum potong tangan. Tetapi, pertanyaan yang sangat penting untuk diajukan adalah apakah hukum potong tangan masih relevan pada saat ini, dan apakah dipandang lebih mashlahah bagi manusia?

Sebelum mengkaji persoalan di atas dengan menggunakan pendekatan *al-mashlahah* lebih awal dikaji dari sisi kebahasaan. Sebab di sinilah akar masalah yang sesungguhnya.

Pemaknaan terhadap lafaz السارق والسارقة memberi kesan bahwa pencuri telah berulang-ulang melakukan pencurian sehingga wajar ia dinamai sebagai pencuri. Hasbie Ash-Shiddieqy dan M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kalau pemahaman ini kita pakai, maka seseorang yang baru sekali mencuri belum wajar disebut sebagai pencuri dan belum bisa dikenai sanksi potong tangan.<sup>17</sup> Berbeda dengan ini, sebagian ulama mengartikan السارق و السارقة (lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri) yang melahirkan pemahaman bahwa meskipun sekali mencuri dan memenuhi ketentuan yang ada tetap dijatuhkan sanksi atasnya.

Berpedoman pada pendapat pertama, memberi kesan bahwa pencuri yang akan dijatuhi hukuman potong tangan ialah mereka yang sudah profesional. Sebab, makna yang terkandung di dalam lafal tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Secara faktual, pada masa 'Ali ibn Abî Thâlib di

---

Press, 1999), h. 21.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Vol. III, h. 86; Hasby Ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syariah Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1972), h. 13-14.



mana seorang pencuri ditangkap dan dilaporkan kepada 'Ali ibn Abî Thâlib dan memerintahkan untuk dijatuhkan sanksi meskipun baru sekali itu saja ditemukan mencuri. Ali berkata, "*Allah tidak mempermalukan seseorang yang baru sekali mencuri.*"<sup>18</sup> Setelah sanksi dijatuhkan, pencuri tersebut mengaku telah berulang kali mencuri. Di sinilah salah satu makna sifat Allah, *al-Gaffâr* (Q.s. al-Mâ'idah [5]:39) yang senantiasa membuka peluang kepada pelaku untuk bertaubat dengan cara menutupi kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Namun, yang bersangkutan tetap dalam perbuatannya sehingga Allah membuka aibnya yang menyebabkan orang lain mengetahuinya.

Selanjutnya, kata *qat'u al-yad* diartikan memotong tangan secara hakiki, yaitu "tangan yang sesungguhnya". Padahal, *قطع اليد* dapat juga diartikan dari aspek lain, yaitu dalam arti *majâzi*. Alasannya adalah ketika Allah bersumpah melaknat Abû Lahab, Allah Swt. menggunakan kalimat *تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ* (Binasalah kedua tangan Abu Lahab). Yang dimaksud kedua tangan adalah "kekuasaan" Abû Lahab. Demikian juga, *يد الله فوق أيديهم* diartikan secara majazi, yaitu "Kekuasaan Allah". Dengan demikian, meminjam makna ini, maka hukum potong tangan dapat dialihkan ke makna lain, yaitu "memotong/ melumpuhkan kemampuan atau kekuasaan."

Dalam konteks pemahaman tersebut, maka hukum potong tangan harus dimaknai lain, tidak hanya terbatas pada memotong tangan yang sesungguhnya melainkan juga memotong segala bentuk yang mengarahkan pencuri untuk melakukan kejahatan pencurian. Hukum potong tangan dengan pendekatan *al-mashlahah*, dapat dikatakan ambivalen dengan *maqâshid al-syari'ah*.<sup>19</sup> Karena salah satu aspek *maqâshid al-syari'ah* adalah memelihara jiwa. Hukum potong tangan sudah dipandang tidak memelihara jiwa manusia karena menghilangkan salah satu organ tubuh yang sangat penting.

Penerapan hukum Islam senantiasa mempertimbangkan kemashalahatan bagi manusia. Untuk maksud ini, segala bentuk hukum harus mengandung mashlahah bagi manusia. Hukum potong tangan dalam arti hakiki, bukan berarti tidak mengandung masalah namun memilih hukuman yang lain akan lebih masalah dan tidak menghilangkan organ tubuh yang sangat penting.

Dalam kaitan itulah, Fazlurrahman mengemukakan bahwa pada kasus pencurian hendaknya diterapkan teori "gradasi". Hal ini berarti bahwa pencuri yang baru sekali mencuri tidak dikenakan hukum potong tangan, tetapi hukum takzir.<sup>20</sup> Sementara Muhammad Sahrûr melihat kasus potong tangan sebagai

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Vol. III, h. 86.

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. III, h. 123-124.

<sup>20</sup> Fazlurrahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, (Bandung:



hukum yang tertinggi, dan dalam penerapannya boleh diganti dengan hukum yang lebih rendah, tetapi tidak boleh melebihi hukum yang tertinggi.<sup>21</sup>

Pemikiran di atas mengesankan bahwa penanganan hukuman ditangani oleh penguasa melalui penjara. Penulis belum melihat penjara sebagai solusi yang tepat terhadap sanksi pidana pencurian, sebab penjara mencerminkan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan: Pertama, dari sudut ekonomi, negara harus mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk menangani penjahat di penjara, namun hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Apabila dana itu dipergunakan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat maka diharapkan pencurian dapat dieliminir. Sebab, dalam banyak fakta, pencuri beraksi pada hakikatnya dilatari oleh persoalan ekonomi.

Kedua, dalam beberapa kasus, penjara seringkali menjadi tempat “kaderisasi” dalam membangun jaringan yang lebih luas. Setelah keluar dari penjara, kemungkinan besar akan melakukan aksi yang lebih sistematis. Ketiga, sistem yang dianut oleh penjara tidak sepenuhnya mengarahkan untuk menyadarkan pelaku kejahatan. Keempat, memenjarakan pencuri berarti memangkas masa depan pelaku dan kelangsungan hidup keluarganya. Karena boleh jadi dialah satu-satunya yang menjadi tumpuan keluarganya. Kelima, penjara juga akan menciptakan manusia-manusia yang malas. Manusia menjadi tidak produktif lagi karena harus dikurung, kecuali kalau penjara menyediakan fasilitas pelatihan sebagai bekal setelah keluar dari penjara.

Dalam konteks keindonesiaan, penjara dipandang sebagai salah satu tempat untuk melumpuhkan kemampuan dan kekuasaan bagi pencuri. Namun pada tataran realitas, penjara dinilai belum memberikan efek jera kepada pelaku. Karena itu, dalam bingkai kemashlahatan perlu adanya sanksi yang tidak berkenaan dengan fisik. Hukuman yang penulis maksud adalah hukuman yang berkenaan dengan mentalitas (psikis). Pemikiran secara falsafi ini didasarkan pada pernyataan Nabi Saw.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن (رواه البخاري)

*Dari Abi Hurayrah R.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, Tidak akan berzina seorang pezina apabila dia beriman, tidak akan minum khamar bagi peminum apabila dia beriman, dan tidak akan mencuri seorang pencuri apabila dia beriman.*

Pada Hadis di atas, diperoleh suatu petunjuk bahwa tindakan seseorang selalu dikaitkan dengan iman, dan iman terkait dengan mentalitas seseorang. Artinya,

Mizan, 1986), h. 60.

<sup>21</sup> Muḥammad Shahrūr, *al-Kitāb wa al-Qurʾān Qirāʾah wa al-Muʾāshirah*, (Mesir: Dār al-Insāniyyah al-ʿArabiyyah, 1990), h. 455.



bahwa perbuatan mencuri yang diekspresikan lewat anggota badan sentralnya adalah jiwa. Karena itu, kalau hanya menghukum fisik tidak menunjukkan prinsip keadilan dan *mashlahah*. Bukankah menghukum fisik juga telah berimplikasi kepada jiwa manusia? Tidak dapat dimungkiri bahwa sanksi hukum dalam bentuk fisik berpengaruh kepada jiwa, namun dimana kita letakkan prinsip *mashlahah* dan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam.

Di lain sisi, menghukum secara fisik membuat pelaku cacat seumur hidup, dan akan melumpuhkan masa depannya. Memang salah satu tujuan sanksi hukum adalah membuat jera. Tetapi kenapa tidak memilih sanksi yang tidak membuat cacat, bukankah sanksi secara fisik juga berarti telah "mencederai" prinsip *maqâshid al-syarî'ah*? Penulis lebih cenderung menilai bahwa penerapan sanksi secara psikis lebih *mashlahah* dan tidak merusak fisik manusia. Bahkan pola ini sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah*. Selain itu, penulis melihat tidak bertentangan dengan nas, sebab terdapat kaidah:

إذا تعارض الناص والمصلحة قد مت المصلحة

*Apabila terjadi pertentangan antara nash dengan mashlahah, maka mashlahah tetap dikedepankan.*

Berangkat dari kaidah di atas, diketahui bahwa *mashlahah* tetap diprioritaskan. Sebab, hukum berkisar pada kemashlahatan hamba, dan jika terdapat suatu *mashlahah* disitulah letak hukum Allah.<sup>22</sup>

Kembali ke sanksi pidana, sebagaimana penulis kemukakan bahwa sanksi psikis lebih *mashlahah* dan sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* maka pemberian sanksi dapat dilakukan dengan cara: (1) Diumumkan ke publik melalui media cetak atau elektronik; (2) Diumumkan ke publik melalui tempat-tempat ibadah secara terus-menerus hingga pelaku merasa jera yang menghantar kesadaran dari dalam dirinya; (3) Apabila yang mencuri adalah pejabat negara, maka dia harus dinonaktifkan, atau pada tingkat terakhir dipecat dari jabatannya. Selanjutnya diumumkan ke publik dan seluruh harta yang dicuri diwajibkan untuk mengembalikan; (4) Apabila yang mencuri adalah rakyat biasa, maka sanksi tetap diumumkan ke publik. Selanjutnya pemerintah berkewajiban untuk memperbaiki ekonomi rakyat dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Sanksi secara psikis, ditinjau dari segi jeratannya lebih berat dibanding daripada sanksi fisik karena, diketahui oleh publik sehingga terbebani secara moral. Dengan beban moral tersebut diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Pengalihan dari sanksi hukum potong tangan kepada sanksi secara psikis (mental) disebabkan oleh beberapa alasan: Pertama, sanksi pidana secara psikis (mental) lebih *mashlahah* dan sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah* sebab tidak menyebabkan terjadinya cacat secara fisik bagi pencuri.

<sup>22</sup> Al-Suyûti, *Al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 176.



Kedua, adanya petunjuk Nabi Saw. yang berkaitan dengan ini, yaitu bahwa setiap perbuatan selalu terkait dengan iman, dan iman satu komponen dengan mentalitas sedangkan mental menjadi sumber perbuatan. Ketiga, terdapat suatu kaidah yang menunjukkan bahwa perubahan suatu fatwa atau hukum karena terjadi perubahan waktu, tempat, dan situasi.

Keempat, dalam fakta sejarah 'Umar ibn al-Khaththâb pernah tidak menerapkan hukum potong tangan karena adanya 'illah yang menghendaknya yaitu terjadi musim paceklik, dan dipandang lebih *mashlahah* untuk tidak menerapkannya. Menggeser hukuman potong tangan ke hukuman fisik, penulis memahaminya lebih *mashlahah*. Kelima, dalam konteks teologi, penulis berkeyakinan bahwa tidak mungkin Allah meletakkan hukum potong tangan sebagai bentuk penzaliman kepada manusia. Dalam banyak ayat, termasuk Q.s. al-Mâ'idah [5]:38, Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai الغفور الرحيم. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang keluar dari ketentuan hukum Allah, termasuk mencuri, dapat melakukan pertobatan sebelum penjatuhan sanksi hukum.

Dengan demikian, melalui sanksi psikis seperti di atas, dalam perspektif HAM, dalam upayanya untuk menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat dapat dipandang sejalan, sebab konsep HAM menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk-Nya. Dan dengan melalui sanksi psikis harkat manusia dapat terhindar dari cacat sepanjang hayatnya. Hal ini berarti bahwa telah terjadi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna.

## Penutup

Berangkat dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, hukuman potong tangan adalah hukum yang mengandung kemaslahatan namun tidak begitu sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah* karena melalui hukum potong tangan manusia menjadi cacat seumur hidup. Dengan cacat seumur hidup berarti hukum telah meng-*cut* masa depan manusia sebagai obyek hukum. Dalam kaitan itu, hukum Islam—hukuman potong tangan—diberi atribut hukum yang dehumanis.

Kedua, dalam konsep HAM, manusia harus dijunjung tinggi hak-haknya, dihargai martabatnya sebagai makhluk-Nya. Segenap sanksi hukum pidana Islam, dalam pandangan penulis, selain mengandung kemaslahatan bagi manusia juga dimaksudkan agar manusia tercegah dari perbuatan itu. Dengan maksud ini, manusia dapat terhindar dari segala yang dapat merusak harkat dan martabatnya. Jika manusia keluar dari fitrahnya, mencuri dan dijatuhi sanksi, maka sanksi itu dimaksudkan agar manusia terdidik dan kembali jalan kebenaran. Di sinilah letak



keselarasan HAM dan hukum pidana Islam (hukuman potong tangan ) yaitu bersama mempunyai tujuan untuk menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Ketiga, dalam konteks kekinian, dengan terjadinya perubahan zaman, waktu dan tempat, diperlukan solusi yang tepat untuk sanksi bagi pencuri. Untuk itu, penjara dipandang sebagai solusi. Namun dalam faktanya, masih banyak persoalan di dalamnya. Karenanya, untuk menyesuaikan sanksi hukum potong tangan dengan kondisi kemodernan, sanksi secara psikis (mental) adalah suatu solusi yang lebih *mashlahah* dan sejalan dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah*. Selanjutnya, sanksi yang disebutkan terakhir terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM. □ *Wallâhu a'lam bi al-shawâb*

### Pustaka Acuan

Al-Qur'ân al-Karîm

Abbas, Hafid, *Wawancara*, Hari Sabtu, 24 Juni 2006 jam 4.30 di Jakarta

Awdah, 'Abd al-Qadîr, *al-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmi*, Juz I, Dâr al-Kutub, 1992 M/1412 H

Badri, al-, Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Ujung Pandang: al-Ahkam, 1998

Baghawî, al-, Al-Husayn ibn Mas'ûd, *Syarh al-Sunnah*, Beirut: al-Maktab al-Islâmi, 1983

Bailey, Peter, *Bringing Human Right to Life*, Australia: The Foundation Press, 1993

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Fazlurrahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1986

Fleiner, Thomas, *What are Humman Rights?*, New South Wales, Australia: The Federation Press, 1999

Hamzah, A., dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Akan Datang*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet. II,

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Ibn 'Asyûr, Muḥammad al-Thâhir, *Al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Mesir: Dâr al-Salâm, 2005

Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqî'in al-Rabb al-'Âlamîn*, III, ttp. : Dar al-Fikr, 1977

Jurjâwî, al-, *Hikmah al-Tasyrî' wa Falsafatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Khathîb, al-, Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, Mesir: Dâr al-Bâb al-Halabi wa Awlâduhu, 1958

Mahendra, Yusril Ihza, *Reaktualisasi Prinsip-prinsip HAM dalam Islam dan UUD*



- 1945 *Sebuah Pengantar* dalam Rusjdi Ali Muhammad, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam", Banda Aceh: Ar-Raniri Press, 2004
- Mudzhah, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- Quthub, Muhammad, *Islam the Misunderstood Religion*, (terjemah) oleh Funky Kusnaedy Timur dengan judul, "Islam Agama Pembebas", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001
- Shahrûr, Muhammad, *al-Kitâb wa al-Qur'ân Qirâ'ah wa al-Mu'âshirah*, Mesir: Dâr al-Insâniyyah al-'Arabiyyah, 1990
- Shiddieqy, ash-, Hasby, *Fakta Keagungan Syariah Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1972
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragam*, Bandung: Mizan, 1999
- Suyûti, al-, *Al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*, Beirut: Dâr asl-Fikr, t.th.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Pusat Studi HAM Univ. Surabaya, 2003), Cet. I,
- Uwâ, al-, Sâlim, *Fî Ushûl al-Nazham al-Jinâ'i al-Islâmi Dirâsah al-Muqâran*, Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1978